

TAJUK RENCANA

Harmonisasi Lembaga Negara

PERSETERUAN antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Polri sepertinya sulit ditutup-tutupi. Sampai-sampai Menteri Koordinator Polhukam Hadi Tjahjanto turun tangan untuk melakukan penyelidikan (KR 29/5). Ini menyusul kabar kasus penguntitan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Densus 88 di sebuah restoran kawasan Jakarta Selatan.

Di tengah simpang siurnya kabar penguntitan tersebut, Jampidsus dilaporkan oleh Pengacara Deolipa Yumara bersama Indonesia Police Watch (IPW) yang mengatasnamakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Febrie bersama sejumlah pejabat lain dilaporkan terlibat korupsi proses lelang Kejaksaan Agung terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya ke KPK. Mereka menduga ada ‘permainan kotor’ dalam penjualan sebuah perusahaan tambang.

Sulit untuk tidak mengaitkan kedua kasus tersebut, antara penguntitan oleh Densus 88 dan pelaporan dugaan korupsi Jampidsus. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi antara Kejaksaan Agung dengan Polri ? Turun tangannya Menko Polhukam diharapkan mampu menjernihkan masalah. Sebab, saat berada di depan publik antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terlihat baik-baik saja dan saling menebar senyum. Tapi di balik itu siapa tahu ?

Logikanya, kalau tidak ada apa-apa, mengapa Menko Polhukam perlu turun tangan dan meminta media ikut mendinginkan situasi ? Dalam konteks itulah kita mengingatkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Media

mainstream diharapkan memberi kabar yang sejelas-jelasnya tentang apa yang sedang terjadi di antara kedua lembaga negara penegak hukum tersebut. Imbauan Menko Polhukam kepada media agar ikut mendinginkan situasi, justru memantik pertanyaan publik bahwa hubungan Kejagung dengan Polri sedang tidak baik-baik saja.

Kita ada pengalaman tidak mengenakan ketika lembaga negara penegak hukum KPK berseteru dengan Polri yang sering kita kenal dengan istilah ‘Cicak vs Buaya’, jilid I, II dan III. Ada ego sektoral dalam kasus tersebut. Padahal, seharusnya, kedua lembaga tersebut saling bahu membahu dalam penegakan hukum, termasuk mengungkap kejahatan korupsi. Hal demikian mestinya tak boleh terulang.

Kita belajar dari sejarah bahwa perseteruan antarlembaga penegak hukum hanya menyisakan kekacauan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi sarana untuk balas dendam, bukan menegakkan keadilan. Untuk itulah kita mengimbau agar perseteruan antara Kejaksaan Agung dengan Polri segera diakhiri, karena selain kontraproduktif justru merugikan penegakan hukum itu sendiri.

Hukum memang harus ditegakkan, namun tak boleh didasari rasa dendam maupun sentimen korps. Kita menginginkan harmonisasi lembaga negara penegak hukum. Lembaga penegakan hukum harus bersinergi dan saling menguatkan demi kepentingan yang lebih besar, yakni tegaknya hukum yang berkeadilan. Kita tunggu turun tangannya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk mengklarifikasi hubungan Kejagung dengan Polri. □

Mendukung Jurnalisme Investigasi

PERS dan jurnalisme adalah kaki empat demokrasi. Ia harus dijaga dan dilindungi. Namun, belakangan, adanya pasal yang melarang jurnalisme investigasi dalam Revisi UU Penyiaran, memantik publik untuk mencermati. Mengapa ada pasal ini di RUU Penyiaran? Bagaimana publik dapat mendukung jurnalisme investigasi tertulis dalam draft publik policy ini?

Di tengah persepsi publik yang minus terhadap wajah demokrasi substansial pada pilpres dan pileg 2024, publik kembali dikagetkan dengan adanya kesengajaan pembuat undang-undang memasukkan pasal pelanggaran terhadap praktek jurnalisme investigasi. Adanya pasal pelanggaran ini sejatinya menunjukkan tiga hal. Pertama, para pembuat kebijakan publik (*public policy making*) terjangkit *sindrom a historis*. Kedua, menunjukkan rendahnya pelibatan publik dalam *urung rembug* dan menentukan substansi kebijakan publik. Ketiga, ada semacam *testing the waters* oleh para perancang undang-undang untuk melihat apa reaksi publik setelah sekian pengalaman kita melihat etika dan moral politik banyak dilanggar dalam fatsun politik kita.

Sejarah Jurnalisme Investigasi
Sebagai bagian dari literasi publik, kita perlu menengok sejarah perjalanan panjang jurnalisme investigasi, baik dalam konteks asal muasal maupun prateknya di Indonesia. Wikipedia mencatat: Sejarah investigasi berawal dari sebelum berdirinya Negara Amerika. Pada 1690, Benyamin Harris menginvestigasi berbagai kejadian di masyarakat dan melaporkannya dalam *Public Occurences, Both Foreign and Domestic*. Isi laporannya dinilai menentang kebijakan kolonial Inggris. Pada awal sejarahnya, jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan *crusading* atau jihad. Pada fase selanjutnya, spirit *crusading* (jihad atau perjuangan) mendapat bentuk yang lebih formal melalui penerbitan New England Courant pada 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin. Istilah investigasi sendiri baru muncul

William E Aipipidely
pertama kali dari Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburg Dispatch (1890). Bly sampai harus bekerja di sebuah pabrik untuk menyelidiki kehidupan buruh di bawah umur yang dipekerjakan dalam kondisi yang buruk. Keistimewaan laporan jurnalisme investigasi Bly terletak pada tuntutan penyelesaian jalan keluar terhadap



KR-JOKO SANTOSO

problema sosial tersebut.

Sedang dalam konteks Indonesia, praktek jurnalisme investigasi dari aneka referensi yang tertulis n buku, jurnal, dll n sejarah terbentang dari Orde Lama yang dilakukan oleh Harian Indonesia Raya dengan karya investigasi tentang korupsi biaya percetakan kartu suara pemilu. Pada Orde Baru, kisah tentang prebreidelan aneka media adalah noktah tentang perlawanan pers terhadap orde tiran. Di Orde Reformasi tak terhitung banyaknya laporan investigasi dari koran nasional dan lokal, majalah dan televisi selalu ada rubrik dan liputan investigasi. Kasus-kasus korupsi dan pidana lainnya terbongkar karena ada karya investigasi jurnalsime. Catatan sejarah ini ada dalam memori kolektif publik.

Citizen Memastikan RUU
Dari catatan di atas dan bagaimana

pers serta jurnalisme investigasi sebagai pilar memperkuat demokrasi substansial, maka pasal siluman yang *a history* ini, kita harus dipastikan tak boleh lolos dalam mekanisme pembahasan para pembuat undang-undang. Publik, citizen, masyarakat sipil, akademisi di kampus, Forum Rektor, mahasiswa, eksekutif, dan semua stakeholders perlu melakukan kerjasama konstruktif. Ada beberapa pikiran yang dapat memandu kita.

Pertama, Kelompok mahasiswa dan kampus membuat agenda diskusi serentak dan berkelanjutan asihw ini. Kampus menjadikawah candradimuka menguji keabsahan cara pikir pembuat *public policy*. Kedua, organisasi masyarakat sipil menginisiasi publik terlibat aktif dalam perumusan *public policy*. CSOs perlu membangun komunikasi dengan partai politik agar terang benderang draft RUU Penyiaran ini. Media perlu terus melakukan peliputan tentang apa di balik pasal siluman. Ketiga, partai politik menggunakan momen ini sebagai bentara pendidikan politik untuk warga menjelang pilkada serentak. Partai politik dan politisi harus keluar dan bicara ke publik posisi mereka atas jurnalisme investigasi. Para calon yang ikut kontestasi pilkada serentak tak boleh diam: apa idenya atas jurnalisme investigasi! Mari membatalkan pasal siluman itu seraya merayakan jurnalisme investigasi! (*)

**)William E Aipipidely, Alumnus Pascasarjana Komunikasi UGM, Konsultan di Losta Institute.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kreativitas dan Etika Konten PPDB

FENOMENA Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di satuan pendidikan yang berlangsung setiap tahun telah melahirkan berbagai strategi publikasi menarik. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, tampak satuan pendidikan dari berbagai jenjang berlomba-lomba memanfaatkan platform tersebut untuk menarik perhatian calon siswa dan orangtua. Flyer digital, video promosi, hingga konten-konten lucu dan kreatif seperti parodi ataupun tari-tarian menjadi bagian dari kampanye yang lazim ditemui. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai peran satuan pendidikan, guru, dan siswa dalam pembuatan konten tersebut, terutama dari sudut pandang kreativitas dan etikanya.

Lesly (1992) menjabarkan bahwa publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media. Proses publikasi di sini sebagai bentuk publisitas suatu kreatifitas yang menghasilkan karya kreatif dan menyenangkan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan aset lingkungannya.

Di era digital, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Publikasi kreatif yang dilakukan oleh sekolah memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan daya tarik sekolah di mata masyarakat. Dengan persaingan yang kian ketat, sekolah-sekolah perlu menonjolkan kelebihan dan keunikannya agar dapat menarik minat calon siswa. Konten kreatif seperti video parodi dan hal lucu dapat memberikan kesan humanis serta dekat kepada masyarakat, sehingga sekolah tidak hanya dilihat sebagai lembaga kaku atau formal. Kedua, publikasi kreatif dapat memperkuat citra positif sekolah. Sekolah yang aktif dan inovatif dalam pembuatan konten di media sosial sering dianggap sebagai sekolah progresif, yakni mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa menjadi nilai tambah di mata orangtua yang ingin anaknya menda-

Ichsan Y Nuansa
patkan pendidikan di lingkungan modern dan adaptif terhadap perubahan.

Namun di balik manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembuatan konten publikasi oleh sekolah. Dari sudut pandang etika, ada pro dan kontra yang harus dipertimbangkan. Pembuatan konten yang melibatkan siswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam bentuk parodi atau hiburan berisiko melanggar batasan etika serta kesopanan. Ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi wibawa sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral untuk membedakan hal baik dari hal buruk (Beekum, 2004:3). Fokus yang berlebihan pada pembuatan konten kreatif bisa mengalihkan perhatian dari tujuan utama pendidikan, yaitu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Siswa, guru, dan tenaga kependidikan sekolah tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan promosi dan tugas utama mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada tantangan dan kritik dalam proses publikasi. Beberapa kritik mungkin datang dari pihak yang merasa bahwa pendekatan kreatif ini tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional pendidikan, dalam hal ini kebudayaan pendidikan. Sekolah harus siap dengan argumen yang konstruktif dan transparan mengenai tujuan dan manfaat dari pendekatan yang diambil.

Guna mengatasi dilema ini, sekolah dapat mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam melakukan publikasi. Sebelum melibatkan siswa dalam pembuatan konten, sekolah harus mendapat persetujuan dari siswa dan orangtua. Begitu pula jika ada guru atau tenaga kependidikan yang menjadi pemeran harus ada konsultasi mengenai jenis konten yang

akan dibuat dan bagaimana prosesnya. Sekolah menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis konten yang dapat diterima dan tidak diterima. Konten harus tetap sopan, edukatif, dan sesuai nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Evaluasi berkala terhadap strategi publikasi juga dilakukan. Evaluasi tersebut menindaklanjuti analisis terhadap efektivitas konten serta dampaknya terhadap citra sekolah dan kesejahteraan siswa hingga guru beserta tenaga kependidikan.

Meski bertujuan untuk promosi, konten yang dibuat sebaiknya tetap memiliki nilai edukatif. Misal, konten yang menampilkan kegiatan belajar-mengajar, proyek kreatif siswa, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tetap berpegang pada nilai-nilai etis adalah hal utama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tetap berada pada rel keteladanan dalam berperilaku dan bertindak. Karena itu, setiap konten yang dipublikasikan akan indah ketika mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas. (*)

**)Ichsan Y Nuansa Putra MPd Gr, guru Bahasa Indonesia dan teater di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekretaris MGMP Bahasa Indonesia SMA Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta.*

Pojok KR

Direktur Taru Martani ditahan kejaksaan.
-- Tetap junjung asas praduga tak bersalah.

MPR minta kebijakan gaji pekerja dipotong Tapera dikaji ulang.
-- Gaji kecil masih dipotong, tambah susah.

DPR tunda pembahasan RUU Penyiaran.
-- Bertentangan UU Pers, batalkan saja.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Guni Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salaman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandryk23@yahoo.com, iklandryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.